



## BOOK REVIEW

**The South in World Politics****Mohamad Rosyidin**Program Studi Hubungan  
Internasional Universitas Diponegoro**Judul:**

The South in World Politics

**Penulis:**Chris Alden, Sally Morphet, and Marco  
Antonio Vieira**Penerbit:**

Palgrave Macmillan

**Tahun Terbit:**

2010

**Suara Dari Selatan: Peran Negara Berkembang Dalam Dunia yang Selalu Berubah**

Pahlawan Perang Dunia II Winston Churchill suatu ketika pernah berkata, "Sejarah dibuat oleh para pemenang". Jika kita membaca dan mencermati sejarah dunia dari masa ke masa, kata-kata tersebut barangkali ada benarnya. Para penakluk Spanyol (*conquistadores*)

mulai dari Christopher Columbus, Fransisco Pizzaro, sampai Hernan Cortez mengarang cerita bahwa orang-orang Indian Amerika adalah masyarakat barbar (*uncivilized*) sehingga menjustifikasi penaklukan oleh masyarakat Eropa yang 'tercerahkan' (*civilized*). Pasca Perang Dunia II Sekutu sebagai pihak yang menang punya otoritas penuh untuk mereka-ulang rancang-bangun tatanan internasional. Dalam konteks ini, pendukung setia hegemoni Amerika John Ikenberry mengatakan dalam bukunya berjudul '*After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars*' bahwa munculnya institusi-institusi global semacam GATT yang kemudian berubah menjadi WTO, IMF, Bank Dunia, bahkan PBB tak luput dari upaya Amerika Serikat untuk merekonstruksi dunia menurut sudut pandangnya.

Jika benar dunia dibentuk oleh kekuatan besar, lantas bagaimana peran negara-negara lain, lebih khusus negara-negara berkembang? Kita semua mahfum bahwa negara-negara berkembang dulunya adalah negara terjajah. Negara-negara ini rata-rata baru lahir dalam kurun waktu pasca Perang Dunia II sampai dengan dekade 1960-an. Dari segi geografis, negara-negara ini menempati tiga kawasan besar dunia yakni Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ketiga kawasan itu secara ekonomi dulunya dianggap sebagai kawasan marjinal, atau *periphery* menurut istilah penganut teori dependensia klasik. Kombinasi antara faktor politik sebagai negara terjajah dan faktor ekonomi sebagai negara 'kelas dua' membuat negara-negara berkembang tidak memiliki andil besar dalam arsitektur tatanan internasional.

Tetapi apakah benar demikian? Argumen itu ditentang dalam buku ini. Alih-alih berpendapat bahwa dunia diciptakan oleh kekuatan-kekuatan dominan, buku ini berangkat dari asumsi bahwa negara-negara berkembang atau 'Selatan' (*the South*) memiliki andil besar dalam mewarnai peta politik internasional. Lebih dari sekedar negara atau kawasan yang memiliki kesamaan nasib dan sejarah, '*the South*' adalah istilah yang menggambarkan suatu identitas yang berimplikasi pada pola perilaku negara-

negara berkembang di level global (hlm. 3-4). Sesuai dengan premis dasar konstruktivis yang diadopsi buku ini, negara-negara berkembang mempunyai andil dalam mendorong lahirnya norma-norma internasional sebagai pedoman dalam melakukan hubungan antar negara. Negara-negara berkembang aktif dalam pelbagai forum multilateral yang membuahkkan gagasan, konsepsi, dan norma yang sangat menentukan pola interaksi antar negara. Dua hal yang disoroti dalam buku ini adalah makna kedaulatan dan norma non-intervensi serta tata kelola ekonomi internasional.

### **Memposisikan Selatan: Antara konfrontasionis dan akomodasionis**

Buku ini menelusuri kiprah institusi-institusi internasional yang dibentuk negara-negara berkembang selama tiga periode waktu, yaitu pada masa Perang Dingin, pasca Perang Dingin, dan permulaan abad-21. Masing-masing mengandung pola kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Tonggak sejarah kiprah negara-negara berkembang dimulai sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) atau Konferensi Bandung pada 1955. Konferensi ini dianggap sebagai forum terbesar di luar PBB yang menyatukan visi dan misi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Untuk pertama kalinya mereka menyepakati prinsip hubungan internasional yang didasarkan pada lima prinsip (*'Panch Shila'* dalam bahasa Sansekerta atau *'Pancasila'*). Kelima prinsip itu adalah saling menghormati integritas wilayah dan kedaulatan, non-agresi, non-intervensi, kesetaraan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai (hlm. 39-40).

Memasuki periode Perang Dingin, pertarungan ideologis antara Barat yang liberal-kapitalis dan Timur yang komunis-sosialis memecah belah orientasi politik luar negeri negara-negara berkembang. Keadaan/kondisi internasional demikian itu mendorong mereka memikirkan ulang eksistensinya di kancah politik dunia supaya tidak terjebak dalam pusaran konflik ideologis negara-negara besar. Diilhami oleh *'Semangat Bandung'* ditambah dengan semakin

memanasnya perseteruan antara Barat dan Timur, mereka menyatukan visi dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) pada permulaan dekade 1960-an. GNB menegaskan kembali *'Semangat Bandung'* yang menekankan pada pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan norma non-intervensi. GNB mencerminkan kepercayaan diri negara-negara berkembang untuk menentukan nasib sendiri tanpa kendali politik dari dua kutub kekuatan adidaya; Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Merasa cukup berhasil dalam menunjukkan eksistensinya dalam percaturan politik internasional, mereka sejourus kemudian melangkah lebih jauh dengan memperluas agenda ke bidang ekonomi. Pada 1963 terbentuklah G-77; forum kerjasama ekonomi negara-negara berkembang, yang disusul dengan lahirnya United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada 1964. G-77 percaya bahwa dengan menciptakan institusi baru atau berpartisipasi aktif dalam institusi internasional yang sudah ada akan menguntungkan bagi ekonomi negara-negara berkembang (hlm. 64). Sekalipun tujuannya ekonomi, G-77 merupakan forum politik dimana anggotanya aktif dalam menyikapi isu-isu internasional. G-77 adalah suatu *'klub'* informal yang menyediakan instrumen bagi anggota-anggotanya untuk melakukan—meminjam istilah Andrew Cooper—*"network diplomacy"*.

Sementara itu, UNCTAD mewakili keberhasilan negara-negara berkembang dalam mendesak aspirasi mereka kepada PBB. Didasari pemikiran bahwa rezim-rezim internasional Bretton Woods buatan Barat seperti GATT, IMF, dan Bank Dunia hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara maju, UNCTAD dimaksudkan sebagai solusi alternatif bagi masalah ekonomi di negara-negara berkembang seperti perdagangan, investasi, dan pembangunan. Masih dalam suasana pertarungan wacana ekonomi-politik antara negara maju dan negara berkembang, gagasan pembangunan ekonomi alternatif yang diusung UNCTAD mengkrystal menjadi norma tandingan yang lebih radikal dengan lahirnya New International Economic Order

(NIEO). Gagasan ini mencuat ketika diadakan pertemuan tingkat tinggi GNB di Algiers pada 1973. Meskipun sempat disuarakan dengan nyaring oleh para pendukungnya, terutama dari negara-negara Amerika Latin, gagasan ini terbukti hanya retorika yang menentang ideologi pasar bebas Barat. Selama 12 tahun sejak pertama kali digulirkan tidak ada kemajuan berarti yang dicapai NIEO (hlm. 84).

Di penghujung dekade 1980-an, pendulum ideologi negara-negara Selatan tampaknya mulai berayun dari kiri ke kanan. Lelah dengan politik konfrontasionis dengan jargon-jargon anti-Barat, negara-negara berkembang perlahan-lahan mulai mengakomodasi paradigma Barat dalam memandang hubungan antar negara. Secara politik, norma kedaulatan dan non-intervensi yang dianggap keramat mulai tergerus oleh fakta adanya pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Irak kepada Kuwait dalam Perang Teluk I tahun 1990. Hal itu masih ditambah dengan pecahnya konflik di Yugoslavia yang memicu pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil. Intervensi kemanusiaan lalu menjadi semacam kosakata baru bagi negara-negara Selatan yang mendukung upaya PBB melakukan intervensi atas nama hak asasi manusia. Lebih mengejutkan lagi, pada pertemuan tingkat menteri di Ghana pada 1991 anggota GNB menyepakati sebuah dokumen yang berisi pengakuan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (hlm. 101), suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara ekonomi, kedigdayaan sistem ekonomi pasar tak mampu diabaikan begitu saja oleh negara-negara Selatan. Sebagian besar negara di kawasan Asia mulai mengadopsi sistem ini meskipun dengan modifikasi setempat. Kemajuan pesat perekonomian sejumlah negara Asia melahirkan istilah yang kemudian dikenal dengan New Industrialized Countries (NICs); kemajuan buah dari sistem ekonomi liberal. Neoliberalisme yang dulunya ditentang habis-habisan kini diakui sebagai mesin pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan mencapai puncaknya ketika mereka berbondong-bondong masuk menjadi

anggota WTO pada pertengahan dekade 1990-an. Situasi ini merupakan titik balik dalam sejarah hubungan Utara-Selatan walaupun pada saat yang sama tipikal perlawanan khas Dunia Ketiga masih tampak seperti menuntut reformasi DK PBB, IMF, Bank Dunia, serta mengkritik bias budaya dalam mendefinisikan konsep hak asasi manusia.

Memasuki abad-21, pendulum berayun lagi ke kiri yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dari negara-negara berkembang. Perkembangan ini tak lepas dari kemajuan ekonomi pasca gegap-gempita industrialisasi yang memacu pertumbuhan ekonomi sejumlah negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meningkatnya Produk Domestik Bruto mendorong meningkatnya kepercayaan diri beberapa *emerging power* untuk memainkan perannya di kancah politik global. Beberapa negara itu adalah Tiongkok, India, Brazil, Afrika Selatan, dan Malaysia yang dianggap sebagai *pivotal state* karena pengaruhnya cukup besar dalam politik internasional abad-21. Ketika kekuatan nasional mulai membesar, muncul keinginan kuat dari negara-negara itu untuk melakukan *soft balancing* terhadap dominasi Barat.

Dalam menerapkan strategi *soft balancing* itu, negara-negara *emerging power* tidak bekerja sendirian. Mereka mendefinisikan ulang konsep regionalisme yang melulu berdasarkan kedekatan geografis menjadi kedekatan identitas. Kesamaan identitas yang dimaksud bukanlah kesamaan dari segi budaya, politik, maupun demografis melainkan lebih pada kesamaan visi dan strategi kebijakan luar negeri yang mengadopsi internasionalisme atau aktivisme (hlm. 184). Multilateralisme menjadi elemen kunci untuk memahami peran negara-negara berkembang dalam menyuarakan aspirasinya. Multilateralisme itu mewujud dalam bentuk *institution coalition building* misalnya BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), IBSA (India, Brazil, dan Afrika Selatan), BRICSAM (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan Meksiko), di antara forum-forum sejenis lainnya. Secara garis besar aspirasi politik yang mereka usung adalah berakhirnya dominasi Barat dan

diakomodasinya kepentingan negara-negara berkembang.

Perkembangan lain yang tak kalah penting adalah diakuinya pengaruh negara-negara berkembang oleh negara-negara maju (G-8) dalam forum G-20. Resesi ekonomi global pada 1998 merobohkan kepongahan negara-negara maju sehingga memaksa mereka menyadari perlunya mengajak negara-negara berkembang untuk ikut berbagi beban menjaga stabilitas ekonomi dan finansial global. Langkah ini tak pernah terpikirkan sebelumnya mengingat G-8 telah lama menganggap diri mereka sebagai aristokrat ekonomi dunia. Melalui forum multilateral tersebut, negara-negara berkembang memanfaatkan pengaruh mereka untuk mengadvokasi kepentingan mereka. Dalam pertemuan tingkat menteri keuangan di Cancun pada 2003, *emerging power* seperti Brazil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan menolak keras kebijakan subsidi pertanian Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dianggap merugikan produk-produk pertanian dari negara berkembang (hlm. 120). Sekalipun masih terdapat perbedaan pandangan antar sesama negara berkembang dalam G-20, setidaknya forum itu menjadi panggung politik bagi negara-negara berkembang untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan negara-negara maju.

Sampai di sini, politik luar negeri negara-negara Selatan masih memperlihatkan karakteristik tradisionalnya yang cenderung melawan kekuasaan dominan. Kontras dengan anggapan para pengamat Barat yang mengira Dunia Ketiga telah berakhir, aktivisme politik luar negeri negara-negara *emerging power* dalam forum-forum multilateral mencerminkan ideologi '*Third Worldism*' meskipun dengan format yang agak berbeda. Aspirasi-aspirasi tradisional semisal perluasan keanggotaan DK PBB, reformasi rezim-rezim Barat (IMF, WTO, dan Bank Dunia) masih nyaring terdengar di pelbagai forum internasional. Sebagai contoh, BRICS menyuarkan visi '*Post-Western World*' seiring dengan menurunnya dominasi Amerika Serikat dalam mengelola tatanan internasional. Perkembangan terbaru menguatkan aspirasi itu seperti tampak pada

keputusan Tiongkok membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai institusi tandingan Bank Dunia yang segera saja menarik minat banyak negara untuk bergabung di dalamnya. Fakta-fakta itu setidaknya membuktikan bahwa negara-negara Selatan memiliki paradigma tersendiri dalam melihat hubungan internasional.

### **Kebangkitan Selatan: Kasus Indonesia**

Buku ini sangat baik dalam menelusuri sepak terjang negara-negara Selatan selama kurun waktu enam dekade, terhitung sejak berakhirnya kolonialisme dan lahirnya '*Semangat Bandung*' pada 1955. Secara metodologis, buku ini konsisten dengan asumsi dasar konstruktivis bahwa institusi bisa berperan sebagai '*pembawa norma*' untuk diakomodasi dan diadopsi sebagai prinsip hubungan antar negara yang ideal. Secara substansial, buku ini dapat disandingkan dengan karya lain yang terbit lebih dulu misalnya buku karya Jacqueline Anne Braveboy-Wagner berjudul *Institutions of the Global South*. Keduanya sama-sama menyoroti institusi yang dibentuk oleh negara-negara Selatan dalam menyikapi pelbagai isu internasional. Di samping itu, keduanya juga menggarisbawahi aktivisme politik luar negeri negara-negara Selatan dalam forum-forum multilateral. Hanya saja, keduanya berbeda dalam hal variabel yang ingin dijelaskan. Sementara buku ini menjelaskan tentang peran institusi internasional yang dibentuk oleh negara-negara Selatan, buku Wagner mencoba menjelaskan motivasi di balik kebijakan negara-negara Selatan melibatkan diri dalam institusi-institusi multilateral. Dengan kata lain, jika buku ini bersifat *outward-looking* buku Wagner bersifat *inward-looking*. Sehingga dengan demikian, buku ini melengkapi literatur sebelumnya dengan membahas bagaimana institusi-institusi dari Selatan mempengaruhi hubungan internasional dari waktu ke waktu.

Namun demikian, buku ini lemah dalam beberapa hal. Satu di antara kelemahan itu adalah penulis luput mengidentifikasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan penting abad-21. Penulis justru memasukkan Malaysia

sebagai *pivotal state* bersama-sama dengan *emerging power* dari negara berkembang. Padahal, reputasi Indonesia sebagai negara *middle power* selama ini mendapatkan tempat yang cukup bergengsi di mata komunitas internasional. Dalam sebuah buku berjudul *The Pivotal States: A New Framework for US Policy in the Developing World* yang terbit tahun 1998, Robert Chase, Emily Hill dan Paul Kennedy memasukkan Indonesia sebagai salah satu dari sembilan kekuatan penting di dunia. Proyeksi itu semakin menguat tatkala Goldman Sachs pada 2007 merilis daftar *emerging market* di luar BRICS yakni 'The Next-11' atau 'N-11' yang memasukkan Indonesia di antara negara-negara lain. Tak mengherankan jika pakar sekaliber Fareed Zakaria dalam bukunya berjudul *The Post-American World* menyebut Indonesia sebagai salah satu poros kekuatan Asia yang sedang bangkit (*the rise of the rest*) selain Tiongkok dan India.

Bagaimana kita yakin Indonesia sebagai negara pivot? Ada dua kriteria untuk menentukan apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara pivot atau tidak. Pertama adalah faktor material, yaitu sumber-sumber kekuatan nasional berupa kemampuan ekonomi yang diukur dari PDB, kekuatan militer, kualitas penduduk, dan sebagainya. Berdasarkan kriteria ini Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai negara pivot. Sejak 2008 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata enam persen per tahun. Secara peringkat, ekonomi Indonesia terus mengalami kenaikan hingga mencapai posisi 10 besar dunia pada 2011 menurut laporan Bank Dunia. Secara militer, anggaran pertahanan Indonesia selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di Asia Tenggara, jumlah anggaran militer Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Singapura. Faktor-faktor lainnya juga menunjukkan tren positif.

Faktor kedua adalah peran Indonesia di kancah internasional. Pasca reformasi Indonesia melakukan reorientasi kebijakan luar negeri dengan penekanan pada diplomasi aktivisme. Selain sebagai anggota G-20 Indonesia juga aktif dalam pelbagai forum-forum multilateral global seperti menginisiasi

Bali Democracy Forum pada 2007, pengiriman Pasukan Garuda ke kawasan konflik, menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan Dewan HAM PBB, mendorong dialog antar peradaban, merangkul Rusia dan Amerika Serikat dalam forum East Asian Summit, serta sejumlah peran penting di kawasan seperti menginisiasi kode tata berperilaku (*Code of Conduct*) konflik Laut Cina Selatan dan menengahi konflik Thailand-Kamboja. Indonesia juga menjadi contoh negara yang berhasil mengawinkan sistem demokrasi dan Islam (moderat) yang oleh sebagian kalangan Barat dianggap mustahil dilakukan. Dengan sederet prestasi itu - meminjam istilah Daniel Kliman- Indonesia merupakan *Global Swing States*; negara yang sangat penting bagi stabilitas tatanan internasional.

Sebagaimana tesis buku ini bahwa kebangkitan negara-negara Selatan dapat mendorong munculnya norma baru dalam hubungan internasional, kebangkitan Indonesia seperti telah dideskripsikan sebelumnya merupakan modal awal bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum kebangkitan negara-negara Selatan untuk lebih giat memainkan peran di lingkup global. Bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi *agenda setter* atau *norm setter* seperti ditunjukkan oleh Korea Selatan di forum G-20. Beberapa negara berkembang di Asia (China dan India), Afrika (Afrika Selatan), dan Amerika Latin (Brazil) berambisi menjadi kekuatan utama *vis a vis* Barat. Tinggal bagaimana Indonesia mentransformasi potensi-potensi yang dimilikinya untuk turut memperkuat suara-suara dari Selatan dalam menyikapi isu-isu yang menjadi perhatian semua negara di dunia. Di sinilah kemudian ambisi pemerintah teramat penting. Tanpa ambisi tidak ada kebijakan luar negeri yang berpengaruh.

*\*Mohamad Rosyidin adalah Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Mohamad menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Jember dan memperoleh gelar S2 di bidang Hubungan Internasional dari Universitas*

*Gadjah Mada. Ia memiliki minat penelitian dalam sub-kajian analisis politik luar negeri, middle power diplomacy, politik luar negeri Indonesia, dan teori hubungan internasional. Mohamad telah mempublikasikan lebih dari 20 artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional, dua artikel opini di media massa nasional, serta beberapa prosiding internasional. Publikasi terbarunya berjudul "Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya" yang dimuat dalam jurnal Analisis CSIS dan "Konflik Internasional Abad-21? Benturan Antar Negara Demokrasi dan Masa Depan Politik Dunia" yang dimuat dalam Jurnal Sosial Politik. Bukunya yang baru saja terbit berjudul "The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional" (penerbit Tiara Wacana) dan diberi kata pengantar oleh Nicholas Onuf. Mohamad bisa dihubungi melalui: mohamad.rosyidin@gmail.com*